BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi, baik secara kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 2002 : 3).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup berbagai hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Hubungan antar negara juga sering didasari oleh adanya persamaan di antara negara – negara tersebut. Mulai dari persamaan bahasa, geografi, ideologi, sampai persamaan kepentingan politik dan ekonomi. Persamaan dalam bidang ekonomi sendiri, berlanjut kepada pembentukan kerjasama dalam bidang perdagangan yang diangkat menjadi perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional (Rudy, 2002 : 5).

Dewasa ini, ekonomi dan perdagangan semakin mengglobal. Setidaknya, itulah istilah yang sering kita dengar untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer yang ditandai oleh menyempitnya ruang dan waktu, menipisnya batas-batas teritorial negara yang oleh para pendukung ekstrem globalisasi diungkapkan sebagai *state borderless*, serta aliran modal dan juga barang-barang melintasi batas-batas negara. Berbagai faktor penyebab dapat diidentifikasi, di antaranya adalah surplus kapital yang mendorong perluasan investasi di wilayah-wilayah baru yang menjanjikan, baik pasar maupun bahan baku demi surplus lebih lanjut. Selain itu globalisasi ekonomi dan perdagangan juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan dilakukannya perdagangan lintas batas negara dalam waktu yang relatif cepat. Revolusi di bidang teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi telah menjadi katalis penting globalisasi ekonomi dan perdagangan sekarang ini. Akibatnya, ekonomi negara-negara nasional menjadi semakin bergantung satu dengan yang lain dalam lingkup global. Ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap negara lain, demikian pula sebaliknya. Kerusakan ekonomi suatu negara akan dengan mudah menyebar ke negara lain seperti efek domino. Oleh karenanya, suatu negara tidak lagi dapat mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan lingkungan ekonomi global (Winarno, 2014 : 29).

Sehingga menumbuhkan kesadaran bersama antar pelaku dalam perdagangan internasional, bahwa semakin diperlukannya dan dibutuhkannya suatu perdagangan bebas. Perdagangan bebas memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat, serta memiliki

harapan dapat menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan serta untuk menarik para investor agar menanamkan investasi dalam negeri serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia (Mayana, 2004 : 219)

Seperti perdagangan bebas yang terjadi antara Indonesia dan India dalam *ASEAN-India Free Trade Area*. *ASEAN-India Free Trade Area* merupakan perjanjian untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tarif, peningkatan akses pasar, jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para anggota yang tergabung dalam *ASEAN-India Free Trade Area* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan India. Menjadi suatu hal yang penting bagi ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan India khususnya di bidang ekonomi terkait dengan *Free Trade Area*. Hal ini mengingat munculnya India sebagai kekuatan baru di Asia dan dunia dalam berbagai bidang khususnya di sektor ekonomi. Tercatat India merupakan kekuatan ekonomi nomor tiga terbesar di Asia. India telah melakukan penetrasi pasar berbagai belahan dunia dan juga menanam investasi, dengan mendirikan pabrik perakitan termasuk di sejumlah negara Asia Tenggara (http://www.suara.com/bisnis/2014/04/30/185051/india-negara-dengan-perekonomian-ketiga-terbesar-dunia/ diakses pada tanggal 25 Oktober 2016)

Menjadi penting bagi Indonesia mengingat India menempati urutan ke-11 sebagai negara tujuan ekspor produk non migas Indonesia dengan nilai US$ 1,05

miliar pada 2000 dan menjadi urutan ke-4 dengan nilai US$ 13,42 miliar pada 2011, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 22,17% per tahun. Pada tahun 2000, India merupakan negara asal impor produk non migas Indonesia peringkat ke-14 dengan nilai hanya US$ 440,30 juta naik menjadi peringkat ke-10 pada tahun 2011, dengan nilai sebesar US$ 4,02 miliar, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,5% per tahun selama 2000-2011. India dengan penduduk terbesar kedua di dunia ini merupakan pasar yang potensial untuk dikembangkan, karena selain potensi konsumsinya yang besar, juga standar kualitas yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, pasar India relatif lebih mudah ditembus dibandingkan dengan negara-negara maju yang cenderung memiliki hambatan non tarif yang lebih banyak dan beragam (http://pse.litbang.pertani an.go.id/ind/pdffiles/RPTP_2013_12.pdf / diakses pada tanggal 25 Oktober 2016).

Jika dilihat dari neraca perdagangan selama lima tahun terakhir Indonesia tentu berkepentingan atas terlaksananya perjanjian perdagangan bebas ini. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang sangat prospektif bagi Indonesia. Beberapa hal yang menjadikan perjanjian ini penting bagi Indonesia yakni perdagangan Indonesia-India terus mengalami peningkatan. Kerjasama ini dapat menjadi penyeimbang atas pengaruh negara-negara besar seperti Tiongkok dan Australia dimana Indonesia masih mengalami defisit dengan kedua negara tersebut dalam kerangka kerjasama *Free Trade Area* (http://www.ke mendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Adapun keingingan India untuk membuka perdagangan bebas dengan ASEAN tidak lepas dengan adanya dorongan dari kebijakan luar negeri India pada tahun 1990-an yaitu kebijakan *look east policy* dan dianggap sebagai strategi penting luar negeri India. Dengan mulai mempromosikan reformasi ekonomi, mengubah pola pembangunan India dan aktif mengembangkan hubungan ekonomi dengan negara tetangga timur India seperti Tiongkok, Korea, Jepang dan ASEAN. Hal ini dilakukan karena pada saat itu runtuhnya Uni Soviet yang menjadi Rusia dan serta adanya krisis yang melanda negara-negara Eropa Timur yang mengakibatkan kerjasama antara India dan negara-negara tersebut merosot serius. India yang saat itu tengah menghadapi krisis neraca pambayaran sangat mengantungkan ekonomi sebelumnya dengan Soviet dan negara-negara Eropa Timur (http://en.people.cn/90780/91343/7778951.html/ diakses pada tanggal 3 Desember 2016).

Kebijakan luar negeri India yang tertanam dalam *look east policy* merupakan sebuah *manifest* besar yang terfokus pada orientasi kebijakan luar negeri India salah satunya menuju Asia Tenggara, sebuah wilayah yang sedang berkembang saat ini. Perekonomian Asia Tenggara merupakan pasar yang hampir belum pernah dimanfaatkan oleh entitas ekonomi utama regional seperti India, Tiongkok, Eropa, atau Amerika Serikat. Selain itu keinginan India untuk terlibat dalam ekonomi Asia Tenggara juga memiliki pertimbangan strategis. Yaitu sejak awal tahun 2000 India khawatir apabila negosiasi perdangangannya dengan WTO gagal. Dan apa bila itu benar terjadi maka India harus sendiri menghadapi pertumbuhan proteksionisme di Eropa dan Amerika. Hal tersebutlah yang kemudian membuat India

menegosiasikan *Free Trade Area* dengan sebanyak mungkin negara yang memiliki keterbukaan, dan India menemukan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara merupakan mitra potensial dan memiliki antusiasme untuk melakukan kerjasama ekonomi dalam kerangka yang berbasis pada pasar bebas (Zhang, 2006 : 9).

Ide untuk membentuk perdagangan bebas ASEAN-India sebenarnya pertama kali diusulkan oleh India. Keinginan India itu diungkapkan oleh Perdana Menteri India saat itu, Atal Bihari Vajpayee, dan disampaikan langsung oleh menteri perdagangan India pada saat itu Murasoli Maran dalam *ASEAN Economic Ministers (AEM)-India Consultations* yang pertama pada September 2002, di Brunei Darussalam. Sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri India itu, hasil dari kajian gabungan antara *ASEAN-India, Joint Study on AFTA-India Lingkages for The Enhancement of Trade and Investment, (ASEAN-India Joint Study)* merekomendasikan hal yang sama yaitu agar kedua belah pihak membentuk *India-AFTA Regional Trade and Investment Area* (IARTIA) (http://asean.org/?static_post=the_first_asean_economic_ministers_and_the_minister_of_india_consultation_15_september_2002_bandar_seri_begawan_brunei_darussalam-2/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Setelah melalui perundingan yang panjang akhirnya, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area (*AIFTA) dapat diselesaikan pada 28 Agustus 2008

dalam *AEM-India Consultations* keenam di Singapura (http://asean.org/joint_media_statement_of_the_sixth_aem_india_consultations-singapore/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Setelah tercapainya kesepakatan menyangkut semua isi dalam *Framework Agreement*, pada saat itu perjanjian tidak langsung ditanda tangani. Karena India sedang mengadakan pemilihan umum pada April hingga Mei 2009, maka Perdana Menteri India pada saat itu, Manmohan Singh menyatakan akan menunda semua penandatanganan FTA, termasuk antara India dan ASEAN hingga pemilu usai pertengahan Mei 2009 dan pemerintahan yang baru terbentuk. Hal ini kemudian menyebabkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India baru ditanda tangani pada 13 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. (http://www.business-standard.com/article/economy-policy/don-t-sign-ftas-till-new-govt-formed-pm-to-ministries-109031000153_1.html/ diakses pada tanggal 1 November 2016).

Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan perjanjian di bagi dalam beberapa periode waktu tertentu. Sesuai dengan kesepakatan, perjanjian tersebut tidak akan serentak diterapkan oleh semua negara anggota ASEAN. Isi perjanjian perdagangan bebas tersebut dibentuk dalam lima kategori *Normal Track, Sensitive Track, Special products, Highly Sensitive List dan Exclusion List*. Adapun isi perjanjian AIFTA mengenai jadwal penurunan tarif yang telah disepakati diantaranya yaitu.

Normal Track atau Jalur Normal dibagi menjadi dua yaitu *Normal Track* 1 (NT1) dan *Normal Track* 2 (NT2). Penurunan tarif untuk Jalur Normal 1 (NT1) sudah dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2013 bagi ASEAN 5, sedangkan untuk Filipina akan berakhir Desember 2018, begitu pula

halnya untuk negara-negara CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam*). Penurunan tarif untuk Jalur Normal 1 (NT1) dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2013 bagi ASEAN 5, sedangkan untuk Filipina akan berakhir Desember 2018, begitu pula halnya untuk negara-negara CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam*). Sedangkan untuk Jalur Normal 2 (NT2) dimulai pada tanggal yang sama dengan jalur pertama dan berakhir di tahun 2016 untuk ASEAN5, 2019 untuk Filipina, dan 2021 untuk negara-negara CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam*).

Sedangkan untuk kategori *Sensitive Track* Tarif MFN (*Most Favoured Nation*) di atas 5% akan diturunkan menjadi 5% dengan jadwal: untuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dengan India, penghapusan tarif dilakukan pada 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2016. Untuk Filipina dengan India, penghapusan tarif dilakukan pada 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2019. Untuk CLMV dengan India, penghapusan tarif dilakukan pada 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2021.

Kategori *Special Products* atau Produk Spesial dilakukan mulai 1 Januari 2010 dan berakhir pada 31 Desember 2019 komoditasnya berupa Minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO), Kopi, Teh hitam, dan Merica. Penurunan tarif dilakukan secara bertahap untuk *Crude Palm Oil* (CPO) dari tarif awal 80% menjadi 76% di tahun 2010 hingga tarif akhir (*end rates*) 37.5% di tahun 2019. Untuk *Refined Palm Oil* (RPO) dari tarif dasar yaitu 90% hingga tarif akhir (*end rates*) sampai dengan 45% di tahun 2019. Untuk Kopi yaitu dari tarif dasar 100% menjadi 45% di tahun 2019. Untuk Teh Hitam dari tarif dasar

100% menjadi 45% di tahun 2019. Dan yang terakhir untuk Merica dari tarif dasar yaitu 70% menjadi 50% di tahun 2019.

Untuk kategori *Highly Sensitive Lists* dibagi menjadi tiga kategori dan penurunan tarif wajib tercapai pada tanggal 31 Desember 2019 untuk Indonesia, Malaysia dan Thailand, tanggal 31 Desember 2022 untuk Filipina, dan tanggal 31 Desember 2024 untuk Kamboja dan Vietnam.

Kategori terakhir yaitu *Exclusion Lists* (Daftar Pengecualian) yaitu jumlah komoditas yang ditetapkan untuk tidak terkena penghapusan tarif tetap berjumlah sama yaitu 489 komoditas (*tariff lines*) yang semuanya adalah komoditas pertanian. Perjanjian ini, sesuai dengan kerangka waktu penurunan tarif, sudah berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. Sedangkan untuk Indonesia baru diterapkan pada 1 Oktober 2010 (http://www.djpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2010/ps40 2010trjind.pdf/ diakses pada tanggal 2 November 2016).

Penerapan 1 Oktober 2010 tersebut dinyatakan oleh menteri perdagangan Indonesia melalui surat resmi nomor 850/kpi.3/30/09/2010 yang dikirim ke Kedutaan Besar India di Jakarta dalam surat tersebut ditulis bahwa Indonesia akan mengimplementasikan ASEAN-India *Trade in Goods Agreement* secara efektif pada tanggal 1 Oktober 2010. Sehingga dikeluarkan peraturan nasional terkait AIFTA dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia nomor 144/PMK.011/2010 yaitu tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area* (http://www.asean.org/uploads/archive/documents/AITIG/Ratification%20 AITIG/Ratification%20AI%20-%20Indonesia%20(Change%20of%20Date).pdf/ diakses pada tanggal 2 November 2016).

Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang dicapai antara ASEAN dengan mitra FTA lainnya. Namun kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komitmen liberalisasi melalui proses "*review*" setelah perjanjian diimplementasikan. Adapun manfaat yang didapat dari AIFTA diantaranya :

a. Indonesia menikmati penghapusan bea masuk atas 70,14% pos tarif India (3.666 *tariff lines*) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 79,35% pos tarif (4.145 *tariff lines*) pada tahun 2016.
b. 4,75% dari ekspor Indonesia ke India (US$ 2.6 miliar) terjadi peningkatan akses pasar hingga 2019, termasuk *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO) yang merupakan komoditas utama Indonesia ke pasar India.
c. India secara bertahap menurunkan bea masuk atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO) masing-masing dari 80% dan 90% menjadi 37,5% dan 45% selama periode 2009-2019. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia mengingat kedua produk andalan Indonesia tersebut akan memperoleh *actual market access* sampai dengan tahun 2019.
d. Komoditas utama Indonesia ke pasar India-batubara-juga menikmati bea masuk 0%.
e. Sebaliknya komitmen Indonesia memberikan perlindungan cukup signifikan bagi industri nasional karena hanya 46,17% pos tarif

Indonesia yang telah dihapuskan pada tahun 2016 (meskipun sesuai kesepakatan dapt di-*review* bersama secara timbal-balik).

f. Jumlah penduduk India yang besar ± 1 miliar jiwa merupakan potensi pasar yang besar bagi produk Indonesia.
g. Penguasaan teknologi informasi dan bidang farmasi dari India dapat dimanfaatkan sebagai proses transfer teknologi bagi para pelaku bisnis.
h. Memacu pelaku bisnis pesaing Indonesia dalam memasuki pasar India (http://www.kemenperin.go.id/download/2572/BukuPerkembangan-Kerjasama-ASEAN-di-Sektor-Industri-(s.d-2011)-/ diakses pada tanggal 27 Oktober 2016).

Jika dilihat dari statisik yang didapat dari Kementerian Perdangangan, ekspor utama dan pasar penting bagi India ke Indonesia adalah besi baja, mesin-mesin, otomotif dan industri kimia. Tata Motors merupakan perusahaan otomotif terbesar India dan telah beroperasi di Indonesia. Menurut direkur Tata Motors Indonesia, Biswadev Sengupta, Indonesia akan menjadi pasar terbesar Tata Motors di dunia. Jika dilihat dari hasil pemantauan kementerian perdagangan, impor Indonesia untuk produk besi baja, mesin-mesin dan otomotif kepada India cukup tinggi tercatat dari tahun 2012 hingga 2015 nilai impor keseluruhannya mencapai US$ 3.9 milyar (http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=133&ekspor=1/ diakses pada tanggal 29 Desember 2016). Sementara untuk industri kimia Indonesia selama ini merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi India di Asia Tenggara setelah Singapura. India diakui lebih unggul di beberapa jenis produk industri kimia, seperti pewarna tekstil dan produk kimia anorganik. Indonesia masih

tergantung dengan produk industri kimia India dikarenakan India lebih unggul dalam industri kimia. Dan menurut hasil pemantauan kementerian perdagangan, impor Indonesia untuk produk kimia selama periode 2012 hingga 2015 tercatat mencapai US$ 3.2 milyar (http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php ?n=133&ekspor=/ diakses pada tanggal 30 Desember 2016).

Sedangkan untuk Indonesia ekspor ke India didominasi oleh komoditas nonmigas berbasis sumber daya alam, terutama minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO). Produksi minyak sawit dunia saat ini didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia. Dan India merupakan salah satu negara tujuan utama dalam ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) setelah Tiongkok. Komoditas kelapa sawit juga merupakan salah satu produk yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia (http://www.indonesia_investments.com/id/bisni s/komoditas--/minyak-sawit/item166 / diakses pada tanggal 28 Oktober 2016).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai komoditas kelapa sawit, setelah berlakunya AIFTA India secara bertahap menurunkan bea masuk atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO) masing-masing dari 80% dan 90% menjadi 37,5% dan 45% selama periode 2009-2019. Adapun data sementara mengenai nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India sebelum berlakunya AIFTA yaitu sebagai berikut: Pada tahun 2005 nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India yaitu sebesar US$ 901,3 juta, di tahun 2006 sebesar US$ 972,6 juta, di tahun 2007

sebesar US$ 2,180,3 juta, di tahun 2008 sebesar US$ 4 109,1 juta, di tahun 2009 sebesar US$ 3 340,0 juta.

Dan nilai ekspor minyak kelapa sawit ke India setelah berlakunya AIFTA pada tahun 2010 yaitu sebesar US$ 4 340,2 juta, di tahun 2011 sebesar US$ 5 256,4 juta, di tahun 2012 sebesar US$ 4 838,4 juta, di tahun 2013 sebesar US$ 4 281,6 juta dan pada tahun 2014 yaitu sebesar US$ 3 635,3 juta (https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1026/ diakses pada tanggal 25 november 2016)

Menurut Pravin S Lunkad ketua *The Solvent Extractors Association of India,* yang merupakan asosiasi industri perdagangan minyak sayur di India mengatakan, India masih sangat tergantung dengan minyak sawit Indonesia dan meyakini impornya terus bertambah sejalan dengan permintaan yang terus meningkat. Berdasarkan data, permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) oleh India pada 2012 sebanyak 7,1 juta ton. Adapun permintaan India 7,1 juta ton pada 2012 itu naik dari 2011 yang sebesar 6,750 juta ton. Sedangkan, produksi *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia pada 2012 sebesar 25,9 juta ton atau naik dari 2011 yang masih 24,1 juta ton. Dia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,2 miliar jiwa, India membutuhkan 18 juta ton minyak nabati dimana 11 juta ton di antaranya berupa impor dan untuk sawit, sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2013, persentase impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia masing-masing sebesar 70 persen dan 30 persen dari kebutuhan India. Sedangkan pada 2014, komposisi impor India dari Indonesia dan Malaysia masing-masing 60 persen 40 persen. Adapun penurunan impor *Crude Palm Oil* (CPO) yang dilakukan India

ke Indonesia dikarenakan tingginya bea keluar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia (http://www.antaranews.com/berita/484034/india-akui-tergantung-dengan-minyak-sawit-indonesia/ diakses pada tanggal 29 Oktober 2016).

Dengan berlakunya AIFTA, liberalisasi perdagangan antara Indonesia dan India semakin ditingkatkan. Hambatan-hambatan seperti hambatan tarif misalnya semakin dikurangi. Dan kedua negara tersebut saling meningkatkan ekspor dan impornya demi memenuhi kepentingan nasionalnya. India dengan produk unggulannya yaitu besi baja, mesin-mesin, otomotif dan industri kimia memiliki kepentingan untuk mengekspor produknya kepada Indonesia. Dan Indonesia sebagai penghasil *Crude Palm Oil* terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk menjual produknya kepada India. Namun dengan berlakunya AIFTA maka produk industri kelapa sawit Indonesia seperti *Crude Palm Oil* harus bersaing dengan produk ` sawit asal Malaysia, Thailand, Ekuador, Kolombia, Papua Nugini dan negara eksportir lainnya. Apabila Indonesia tidak bisa mempertahankan *bargaining position*, maka India akan beralih mengimpor *Crude Palm Oil* (CPO) dari negara lainnya terutama dari Malaysia.

Dalam peninjauan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian mengenai kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan Mitra Wicara ASEAN (ASEAN *Full Dialogue Partner*). Sebagai tinjauan yang pertama yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul *Perkembangan Ekspansi Perusahaan Otomotif India (Bajaj Auto, Tata Motors, TVS) Di Indonesia* yang di tulis oleh Tapalani Novia, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan ekspansi perusahaan otomotif asal

India yaitu Bajaj Auto, Tata Motors, dan TVS setelah berlakunya *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) yang mempengaruhi peningkatan jumlah investasinya di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) yang terjadi di Indonesia namun perbedaannya adalah fokus penelitian yang ditulis oleh Tapalani Novia yaitu membahas perusahaan otomotif asal India setelah berlakunya *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA).

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai tinjauan adalah jurnal JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Volume. 2, No. 2, yang ditulis oleh Puteri Dwi Lestari, dari Universitas Riau, jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul *Pengaruh Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA) Terhadap Industri Petrokimia Indonesia Pada Sektor Perdagangan.* Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan India sebelum dan setelah diimplementasikannya AIFTA khususnya terhadap industri petrokimia di Indonesia. Garis besar dalam jurnal tersebut adalah industri petrokimia Indonesia dibanjiri oleh produk import petrokimia India yang harganya lebih bersaing dibanding dengan produk petrokimia Indonesia, dimana India memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi sedangkan Indonesia sebaliknya. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai perdagangan bebas antara Indonesia dan India dalam *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA). Adapun perbedaannya adalah pembahasan yang ditulis oleh Puteri Dwi Lestari lebih fokus mengenai industri petrokimia sedangkan penelitian yang peneliti tulis yaitu mengenai industri *Crude Palm Oil* (CPO).

Sebagai tinjauan penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Raisa Dara, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Komputer Indonesia, tahun 2014 dengan judul *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi China Pasca Penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) (Studi Kasus: Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) 2010-2013)*. Penelitian tersebut mengemukakan sejauh mana strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi Tiongkok pasca penerapan *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) terutama dalam sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasannya mengenai kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan mitra wicara ASEAN. Adapun perbadaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut adalah negara dalam penelitian tersebut adalah Tiongkok dan penelitian tersebut lebih membahas mengenai pengaruh dan langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Untuk tinjauan penelitian terakhir yaitu skripsi yang berjudul *Dampak Penghapusan Hambatan Tarif Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap Devisa Indonesia dari Sektor Pertanian* yang ditulis oleh Rista Gema Maratma, jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Komputer Indonesia. Yang bersangkutan menjelaskan mengenai dampak ACFTA terhadap devisa Indonesia dari sektor pertanian, dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana beberapa produk pertanian Tiongkok memiliki kualitas yang cukup baik serta harga yang lebih terjangkau. Namun Indonesia memiliki beberapa produk pertanian lain yang lebih unggul dibandingkan Tiongkok seperti kakao atau coklat, kelapa sawit, teh

dan karet. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai perdagangan bebas dan dampaknya terhadap pendapatan ekonomi Indonesia serta perdagangan bebas dengan mitra wicara ASEAN. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut adalah negara yang diteliti dan sektor industrinya berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut yaitu bagaimana kerjasama *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) antara Indonesia dan India, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul : "**Kerjasama Perdagangan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Indonesia-India Dalam Kerangka *ASEAN-India Free Trade Area* (2010-2015)".**

Ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat tema tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang khusus mengkaji tentang kawasan Asia Tenggara dimana terdapat ASEAN yang terlibat dalam menerapkan *free trade area* serta pola interaksi diantara para aktor dalam hubungan internasional yang terjadi di dalamnya.
2. Diplomasi dan Negosiasi. Dimana mata kuliah ini menjelaskan bagaimana suatu negara harus menjaga kepentingan nasionalnya dan mencapai keuntungan maksimumnya dengan melakukan diplomasi dan

negoisasi. Seperti halnya yang dilakukan antara Indonesia dan India dalam melakukan perdagangan bebas

3. Ekonomi Politik Internasional. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana sektor Ekonomi berkaitan dengan sektor politik diterima secara sosial serta mempelajari tentang interaksi ekonomi antar negara dalam berbagai sektor.
4. Bisnis Internasional. Merupakan fokus kajian peneliti dimana mata kuliah tersebut menjelaskan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain, mengkaji tentang hubungan atau interaksi antar aktor dalam hubungan internasional berdasarkan perspektif ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan kajian yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu

"Bagaimana Kerjasama Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Mentah Antara Indonesia dan India Dalam Kerangka AIFTA (2010-2015) ?".

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan tiga pertanyaan yaitu:

1. Kesepakatan-kesepakatan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dan India dalam kerjasama perdagangan AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) ?
2. Sejauh mana hasil perdagangan yang dialami oleh Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan dalam rangka AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) ?
3. Bagaimana prospek kerjasama perdagangan Indonesia-India pasca AIFTA terutama pada kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengambil pembatasan masalah dari tahun 2010 hingga 2015 dengan tujuan agar lebih memfokuskan pembahasan yang akan diuraikan di dalam penelitian ini. Tahun 2010 dipilih karena tepatnya pada 1 Oktober 2010 merupakan awal diberlakukannya AIFTA secara efektif. Dimana pengurangan tarif mulai diberlakukan terutama pada produk *Crude Palm Oil* (CPO) yang semula dikenakan tarif sebesar 80% menjadi 76% pada tahun 2010.

Sedangkan alasan lain peneliti membatasi masalah penelitian ini hingga tahun 2015 dikarenakan tahun 2015 dipilih sebagai acuan data terakhir yang akan dimuat dalam skripsi Maksud dan Tujuan Penelitian.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kerjasama perdagangan minyak sawit mentah antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2010-2015. Serta bagaimana pemerintah Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan pasca penurunan tarif AIFTA terutama dalam kerjasama perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) mengetahui Indonesia merupakan penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia serta India merupakan pasar utamanya. Dan untuk mengetahui sejauh mana AIFTA diterapkan baik oleh Indonesia maupun India.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas kasus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kerjasama perdagangan minyak sawit mentah antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang disepakati serta upaya Indonesia dan India dalam AIFTA terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*)
3. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana implementasi *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) membantu Indonesia dan India dalam melakukan kerjasama perdagangan terutama pada perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).

4. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prospek kerjasama perdagangan Indonesia-India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) terutama dalam kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*).

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk literatur khususnya dalam mengetahui perkembangan mengenai kerjasama perdagangan antara Indonesia dan India pasca *Asean-India Free Trade Area* (AIFTA) sehingga diharapkan dapat menjadi bahan bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dan India.

Diharapkan juga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.